

**PENGARUH KINERJA PEGAWAI, PENGAWASAN MELEKAT DAN
PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)**

Nurhanifah
NIM: 1002155473

Nurhanifah692@gmail.com / HP. 081376750335

ABSTRACT

Financial management of local government is essentially the entire area activities including planning, administration, reporting, accountability, and oversight of local government finances.

This study aims to determine the effect of Employee Performance, Embedded Control and Functional Control Towards The Effectiveness of The Financial Management of Local Government at SKPD Riau Province as the research object. Respondents in this study were 97 echelon III and IV. The type of data used is primary data by using questionnaire method of data collection. The method of data analysis used in this study is multiple regression with the help of SPSS software version 19.0.

The results of this study show, both partial and simultaneous variable of employee performance, embedded control and functional control significant positive effect on the effectiveness of the financial management area. While the coefficient of determination shows all independent variables used in this study provide a contribution of 39 % of the dependent variable. While the remaining 61 % describe other independent variables that are not observed in this study.

Keywords : employee performance , embedded control , functional control , the effectiveness of the financial management area

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan dan penggunaan APBD oleh SKPD, masalah yang selalu menjadi sorotan masyarakat adalah inefisiensi, kebocoran dan pemborosan anggaran. Sehingga muncul tuntutan agar SKPD meningkatkan pelayanan melalui perwujudan *value for money* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan pelayanan umum yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan

efektivitas. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi dan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Pengertian pengelolaan keuangan daerah terdapat dalam peraturan Mendagri yang tertuang dalam Kepmendagri No.13 Tahun 2006 bab 1 Pasal 1 ayat 8 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah : "Pengelolaan keuangan daerah pada hakekatnya

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. (2006:2).

Kinerja pegawai pada dasarnya terbentuk setelah pegawai merasa adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi, dengan kata lain apabila kebutuhan pegawai belum terpenuhi sebagaimana rnestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kinerja pegawai akan sulit terbentuk. Setiap orang yang bekerja digerakan oleh suatu motif. Motif pada dasarnya bersumber pertama-tarna sebagai kebutuhan dasar individu atau dapat dikatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seorang untuk bekerja giat dalam pekerjaanya tergantung dari hubungan timbal balik antar apa yang diinginkan atau dibutuhkan dan hasil pekerjaan tersebut dan seberapa besar keyakinan organisasi akan memberikan kepuasan bagi keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya.

Pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencana adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Pengklasifikasian pengawasan menurut metode pengawasannya dapat dikelompokkan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pelaksanaan pengawasan dengan penekanan pada pentingnya peranan atasan atau pimpinan disebut sebagai pengawasan melekat. Revrisond (1999:126) menjelaskan

bahwa pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat dan memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi. Tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin terlaksananya tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan beribawa.

Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian Dina Mardiana (2011) dan Rudi Harto (2012). Berbeda dari penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menggunakan variabel pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang diadopsi dari variabel Rudi Harto (2012) dan mengkombinasikan dengan variabel Dina Mardiana (2011) sebagai penambahan variabel yaitu variabel kinerja pegawai. Sampel pada penelitian ini adalah dinas dan badan di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau).”**

1. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 yang dikutip oleh HAW. Widjaja dalam bukunya Otonomi Daerah dan Daerah Otonom dijelaskan bahwa : “Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD”. (2006:146).

Pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektifitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Konsep efektifitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2004:132) mengemukakan bahwa efektifitas adalah:

“Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi tersebut

telah mencapai tujuannya dikatakan telah berjalan dengan efektif.”

Selain itu dalam peraturan menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006 disebutkan bahwa efektivitas adalah:

“Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.”

Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *output* dengan *outcome*. *Output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan. Sedangkan *outcome* adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value for money*.

2. Kinerja Pegawai

Kinerja merupakan hasil dan keluaran yang dihasilkan oleh seorang pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi dalam suatu periode tertentu. Kinerja pegawai yang baik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya instansi untuk meningkatkan produktivitas. Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi atau instansi.

Pengukuran kinerja akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

a. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Menurut Moh. Mahsun (2006:98) dalam buku pengukuran kinerja sektor publik, pokok suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
 2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
 3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
 4. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).
- b. Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi
 - c. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja
 - d. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran Organisasi
 - e. Evaluasi Kinerja

Jadi, diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap manajer organisasi sektor publik, sebagai orang yang diberi amanah oleh masyarakat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Apabila dalam melaksanakan kegiatannya ditemukan hambatan-hambatan ataupun kendala yang mengganggu pencapaian kinerjanya, juga akan diungkapkan dalam pengukuran kinerja tersebut.

Pengukuran kinerja ini sangat penting baik bagi pihak yang memberikan amanah maupun pihak yang diberi amanah. Bagi pemberi amanah, pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai kinerja para manajer sektor publik, apakah mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan atau tidak. Sedangkan bagi yang diberi amanah, pengukuran dapat digunakan sebagai media untuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan amanah yang telah dipercayakan kepada mereka. Selain itu pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi mereka untuk mengetahui seberapa jauh prestasi yang telah berhasil diraihinya.

3. Pengawasan Melekat

LAN RI (1997 : 160), mengemukakan pengertian Pengawasan Melekat (*Waskat*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya.

Situmorang (1998 : 71) dalam Harto (2012) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, *Waskat* adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan dapat diartikan atasan langsung atau disebut juga pejabat yang karena struktur organisasinya atau kewenangan khususnya termasuk proyek, membawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahan. Bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab serta wajib melapor kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang harus dipunyai oleh seorang pimpinan, dalam memberikan tugas atau

tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya, agar arah, sasaran dan tujuan pelaksanaan tugas atau tanggungjawab tersebut tidak menyimpang dan selesai sesuai dengan perencanaan atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengawasan melekat yang dimaksud tentu bermakna luas dan menjadi bagian integral dari konsep dan gaya kepemimpinan seseorang.

4. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007) adalah:

“Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprov, Itwikab/kota.”

Pengertian Pengawasan Fungsional menurut Sadu Wasistiono (2010) adalah sebagai berikut:

“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah.”

Pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil satu kesimpulan

mengenai pengawasan fungsional, yaitu:

- 1) Pengawasan keuangan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan.
- 3) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pemerintah baik secara intern maupun ekstern sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pengawasan fungsional dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran.
- 5) Pengawasan fungsional di Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pengawasan fungsional ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Aparatur pengawasan fungsional dibentuk oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 44 tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2009 menjelaskan bahwa aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan internal pemerintah daerah adalah:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2. Inspektorat jenderal Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non

- Departemen, dan Instansi Pemerintah Lainnya
3. Inspektorat Wilayah Propinsi
 4. Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kota.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Pengawasan dimaksud bukan merupakan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD. Sejalan dengan uraian tersebut, Freeman (2003:71) menegaskan salah satu pihak yang berkompeten dalam melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap anggaran adalah pihak legislatif.

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

1. Pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Soedaryono (2006:42) dalam bukunya "Tata Laksana Kantor" bahwa: "Pegawai atau karyawan adalah golongan masyarakat, yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik

kesatuan kerja pemerintah, maupun kesatuan kerja swasta". Dalam pengelolaan keuangan daerah diketahui bahwa motor penggerak yang mengelola keuangan daerah secara baik atau tidak tersebut tergantung pada Sumber Daya Manusianya (SDM), dalam hal ini ditunjukkan melalui cara kerja atau pun hasil kerja dari pegawai tersebut.

Dody Hermana (2009) membuktikan dalam penelitiannya bahwa Kinerja Pegawai dapat mempengaruhi efektivitas keuangan daerah. Dikatakan bahwa Kinerja Pegawai sangat menunjang terhadap pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah maupun dalam pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan optimal. Hasil penelitian yang dilakukan Dina Mardiana (2011) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja pegawai dengan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Hipotesis 1: Kinerja pegawai berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Situmorang (1998:71) dalam Rudi Harto (2012) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi. Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang

dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dengan demikian efektifitas pengelolaan keuangan daerah ini sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan yang dilembagakan oleh seorang pimpinan di dalam instansi yang menjadi wewenangnya. Sebagaimana yang disimpulkan dalam penelitian Rudi Harto (2012) bahwa pengawasan melekat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Hipotesis 2: Pengawasan melekat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Perilaku profesional yang memadai pada aparat pengawasan fungsional merupakan kebutuhan dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa professional akan meningkat jika auditor memiliki kemampuan professional dalam melaksanakan pekerjaannya. (Arens et al. 2006, Maryani dan Ludigdo 2001, Wahyudi 2007).

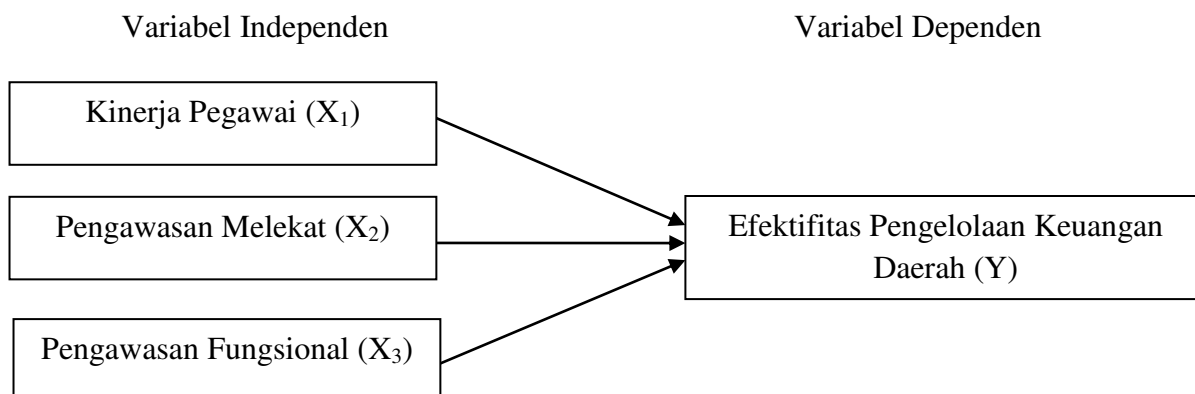
Jika kegiatan audit dilandasi dengan kemampuan professional aparat yang melakukan audit yaitu (1) memiliki kemampuan /keahlian yang disyaratkan, (2) independen, (3) serta menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama, maka hasil audit yang dilakukan akan lebih baik (Arens et al.2006, Wahyudi 2003, Ikatan Akuntan Indonesia 2008, Badan Pemeriksa Keuangan 2008). Dengan demikian secara konseptual profesionalitas aparat pengawasan fungsional mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan audit pemerintahan.

Penulis berpendapat bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap adanya efektifitas pengelolaan keuangan daerah, dikarenakan bahwa pengawasan fungsional dapat meningkatkan adanya ke efektifitasan pengelolaan keuangan daerah, semakin sering melakukan pengawasan maka semakin bagus pula efektifitas pengelolaan keuangan daerahnya.

Hipotesis 3: Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Model Penelitian

Pengaruh antara kinerja pegawai, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada penelitian ini digambarkan dalam model berikut:



Gambar 2.1: Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke SKPD (Badan dan Dinas) di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Responden dari penelitian ini adalah pejabat eselon III dan IV di Dinas dan Badan Provinsi Riau, Alasan penulis memilih Pejabat eselon III dan IV sebagai responden selain karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana, juga karena pejabat tersebut adalah manajer atau pimpinan setingkat *middle management* di instansi pemerintah daerah Provinsi Riau yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah pada instansi masing-masing. Pejabat eselon III dan IV di Dinas dan Badan Provinsi Riau berjumlah 613 orang.

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Slovin. Model rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dari perhitungan rumus slovin diperoleh jumlah sampel sebanyak 86 orang, yang terdistribusi secara proporsional pada masing-masing SKPD.

Pengukuran instrumen pada setiap variabel kinerja pegawai, pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan *Skala Likert*. Dengan skala penilaian (skor) 1 sampai dengan 5 guna mengukur sejauh mana pengaruh variable-variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana, masing-masing variabel diberi daftar pertanyaan yang diambil dari kuesioner. Kemudian masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1 untuk jawaban ekstrim negatif dan nilai 5 untuk jawaban ekstrim positif.

Pada penelitian ini juga dilakukan uji validitas dan reliabilitas agar pengukuran data yang dilakukan diyakini dapat memberikan hasil dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Kesimpulan dari uji validitas dan reliabilitas atas empat instrumen yang terlibat adalah valid dan reliable. Karena skala pengukuran item pernyataan adalah skala ordinal, maka perhitungan validitas menggunakan rumus *pearson product moment*.

Apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor menunjukkan hasil >

0,1996 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Ukuran reliabilitas ditunjukkan oleh *cronbach alpha*, batasan nilai minimum *Alpha* dalam penelitian ini adalah 0,6 (Sekaran, 2003). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu software SPSS versi 19. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Adapun model persamaan statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

a = Konstanta

$b_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi Parsial

e = Variabel Pengangguan (error)

X_1 = Kinerja Pegawai

X_2 = Pengawasan Melekat

X_3 = Pengawasan Fungsional

Y = Efektifitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Ada empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan

metode regresi (Wijaya, 2010). Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tidak bisa dipenuhi.

Uji Koefisien Regresi Parsial (uji t)

Pengujian koefisien regresi parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji signifikan t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{table} atau dengan melihat p value masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.1 : Tingkat Pengembalian Kuesioner

	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	124	100 %
Kuesioner yang kembali	97	78,2 %
Kuesioner yang tidak kembali	27	21,8 %
Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	0	0
Kuesioner yang dapat dianalisis	97	78,2 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 124 buah atau sebesar 100 %. Kuesioner yang kembali sebanyak 97 buah atau sebesar 78,2 %. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 27 atau sebesar 21,8 %. Kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 97 atau sebesar 78,2 %.

a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel 4.2 : Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
- Pria	61	62,89 %
- Wanita	36	37,11 %
Pendidikan		
- D3	11	11,34 %
- S1	47	48,45 %
- S2	39	40,21 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang jenis kelamin pria sebanyak 61 orang atau sebesar 62,89 %. Sedangkan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 36 orang atau sebesar 37,11 %. Untuk tingkat pendidikan, tamatan D3 sebanyak 11 orang atau sebesar 11,34 %, tamatan S1

sebanyak 47 orang atau sebesar 48,45 %, dan tamatan S2 sebanyak 39 orang atau sebesar 40,21 %.

b. Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel 4.3 : Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPTotal	97	18.00	25.00	20.9794	1.52738
PMTotal	97	51.00	64.00	57.5464	3.51491
PFTotal	97	52.00	62.00	56.7010	2.65426
EPKTotal	97	58.00	71.00	66.0206	3.60549
Valid N (listwise)	97				

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu kinerja pegawai (X_1), pengawasan melekat (X_2), dan pengawasan fungsional (X_3). Serta terdapat 1 variabel dependen yaitu efektivitas pengelolaan keuangan (Y) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 97, nilai minimum adalah 18, nilai maximum adalah 25 dan nilai rata-rata (mean) adalah 20,97. (X_2) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 97, nilai minimum adalah 51, nilai maximum adalah 64 dan nilai rata-rata (mean) adalah 57,54. (X_3) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 97, nilai minimum adalah 52, nilai maximum adalah 62 dan nilai rata-rata (mean) adalah 56,70. (Y) mempunyai jumlah

responden (n) sebanyak 97, nilai minimum adalah 58, nilai maximum adalah 71 dan nilai rata-rata (mean) adalah 66,02.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji validitas variabel kinerja pegawai (X_1) semua item pertanyaan dinyatakan valid. Variabel pengawasan melekat (X_2) terdapat dua item pertanyaan yang dinyatakan tidak valid yaitu pertanyaan nomor 1 dan 12. Oleh sebab itu, item pertanyaan tersebut tidak dimasukkan untuk mengolah data selanjutnya. Variabel pengawasan fungsional (X_3) terdapat dua item pertanyaan yang dinyatakan tidak valid yaitu pertanyaan nomor 5

dan 13. Oleh sebab itu, item pertanyaan tersebut tidak dimasukkan untuk mengolah data selanjutnya. Sedangkan, variabel efektivitas pengelolaan keuangan (Y) terdapat lima item pertanyaan yang dinyatakan tidak valid yaitu

pertanyaan nomor 1, 5, 11, 13 dan 15. Oleh sebab itu, item pertanyaan tersebut tidak dimasukkan untuk mengolah data selanjutnya.

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4 : Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Alpha Cronbach's	Batas Reabilitas	Keterangan
Kinerja Pegawai (X ₁)	0,695	0,6	Reliabel
Pengawasan Melekat (X ₂)	0,800	0,6	Reliabel
Pengawasan Fungsional (X ₃)	0,724	0,6	Reliabel
Efektivitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0,945	0,6	Reliabel

HASIL UJI HIPOTESIS

Tabel 4.5 : Hasil Uji Hipotesis secara parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	33.564	6.703		5.007	.000
PMTotal	.146	.068	.201	2.343	.015
PFTotal	.061	.069	.283	2.885	.008
KPTotal	.482	.119	.379	4.055	.000

1. Hasil Uji Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel kinerja pegawai (X₁) diperoleh t_{hitung} sebesar 4,055. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada signifikan $\alpha=5\%$ yakni sebesar 2,278. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,055 > 2,278$), artinya H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja pegawai berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah propinsi Riau.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis pertama ini membuktikan bahwa kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan motor penggerak yang mengelola keuangan daerah secara baik atau tidak sangat bergantung pada Sumber Daya Manusianya, dalam hal ini ditunjukkan melalui

cara kerja atau pun hasil kerja dari pegawai tersebut. Dalam hal ini, semakin baik kinerja pegawai maka semakin efektif pula pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan.

Hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini mendukung hasil dari penelitian sebelumnya yaitu Dody Hermana (2009) membuktikan dalam penelitiannya bahwa Kinerja Pegawai dapat mempengaruhi efektivitas keuangan daerah. Dikatakan bahwa Kinerja Pegawai sangat menunjang terhadap pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah maupun dalam pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan optimal. Begitu juga Hasil penelitian yang dilakukan Dina Mardiana (2011) juga menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja pegawai dengan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Hasil Uji Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel pengawasan melekat (X_2) diperoleh t_{hitung} sebesar 2,343. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada signifikan $\alpha=5\%$ yakni sebesar 2,278. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,343 > 2,278$), artinya H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan melekat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah propinsi Riau.

Hasil hipotesis kedua penelitian ini telah berhasil membuktikan bahwa semakin baik pengawasan melekat yang dilakukan maka akan semakin efektif pengelolaan keuangan daerah yang terlaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau. Pengawasan melekat merupakan tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi. Dengan demikian efektifitas pengelolaan keuangan daerah ini sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan yang dilembagakan oleh seorang pimpinan di dalam instansi yang menjadi wewenangnya.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis kedua ini mendukung hasil penelitian Rudi Harto (2012) bahwa pengawasan melekat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas

pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga dengan Austin (2012) yang menyatakan pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Pekanbaru.

3. Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel pengawasan fungsional (X_3) diperoleh t_{hitung} sebesar 2,885. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada signifikan $\alpha=5\%$ yakni sebesar 2,278. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,885 > 2,278$), artinya H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah propinsi Riau.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam pengujian hipotesis ketiga ini mendukung penelitian Rudi Harto (2012) yang menyimpulkan bahwa Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat kerja daerah Tasikmalaya. Begitu juga dengan Dina Mardiana (2011) berpendapat bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada inspektorat kota Bandung.

Uji Koefisien Determinasi R²

Tabel 4.6 : Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.636 ^a	.390	.364	2.42752	1.582

a. Predictors: (Constant), KPTotal, PMTotal, PFTotal

b. Dependent Variable: EPKTotal

Adjusted R Square sebesar 0,390 (39%) ini menerangkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah propinsi Riau dapat diterangkan oleh faktor kinerja pegawai, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berpengaruh sebesar 39%, sedangkan sisanya sebesar 61% menggambarkan variabel-variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menguji variabel kinerja pegawai, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah propinsi Riau. Dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum hasil pengujian validitas dan reabilitas telah menunjukkan hasil yang baik dan dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Begitu juga semua uji asumsi klasik yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Serta hasil uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berpengaruh positif signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Riau.

3. Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,390 (39%) menerangkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah propinsi Riau dapat diterangkan oleh faktor kinerja pegawai, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berpengaruh sebesar 39%, sedangkan sisanya sebesar 61% menggambarkan variabel-variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Diantara keterbatasan tersebut adalah tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya. Selain itu peneliti merasakan kurangnya tingkat partisipasi dari responden, sehingga jumlah data yang didapatkan dari

kuesioner dirasakan belum maksimal.

Dengan keterbatasan diatas, maka penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

- a. Disarankan menambah jumlah sampel yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat.
- b. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil empirik yang lebih kuat yaitu dengan menambah variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam rangka pengelola keuangan daerah yang baik, sebaiknya menerima pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan pelatihan dibidang keuangan dan komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Askam Tuastikal. 2008. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Finance and Banking Journal vol. 10. No. 1.
- Badan Kepegawaian Negara. 2003. Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Bambang Yudoyono. (2003). Otonomi Daerah,

Desentralisasi, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Dan Anggota DPRD. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dina Mardiana. 2011. *Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey pada Inspektorat Kota Bandung)*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012
- Porter, Thomas, (1992). EDP Pengendalian dan Auditing. Jakarta : Erlangga.
- Prayitno, Duwi. 2012. Belajar Mandiri Analisis Data Dengan SPSS. Mediakom. Jakarta.
- Revrison Baswir. (1999). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Romi Juliandra. 2007. *Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dana Pengawasan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Rudi Harto. 2012. *Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya)*. Skripsi
- _____, Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- _____, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Saponah. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. SNA VI
- Sugiarto, dkk. 2001. *Teknik Sampling*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Syakroza, A. 2002. *The Effect of Politics on Budgetary Control: A Study of Fertilizer Industry in Indonesia*. International Journal of Business Studies. Vol 10. Hlm. 75-96.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UNDP. Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007. Kemitraan. Jakarta. 2008
- Widjaja. (2004). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja Gunawan. (2002). Pengelolaan Harta Kekayaan Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, Toni. 2011. *Cepat Menguasai SPSS 19*. Penerbit Cahaya Atma. Jakarta.

www.riau.go.id